



Kejaksaan Sidik Dugaan Korupsi di Bank DKI

JAKARTA — Kejaksaan Tinggi Jakarta tengah menyidik dugaan korupsi pengucuran kredit sebesar Rp 230 miliar dari Bank DKI kepada PT Likotama Harum. "Ada dugaan pembobolan," kata Kepala Kejaksaan Adi Toegarisman kemarin.

Jaksa menemukan dugaan penyelewengan persetujuan kredit oleh direksi Bank DKI karena kredit modal kerja itu tak memenuhi persyaratan. "Aplikasinya tidak sesuai dengan buku pedoman perusahaan," kata Adi.

Menurut Adi, jaksa menemukan bahwa Likotama diduga memanipulasi aplikasi perpanjangan kredit pada 2013. Dalam permohonannya, Likotama menyatakan kredit akan dipakai untuk membiayai empat proyek pembangunan di beberapa daerah senilai Rp 779,6 miliar. Faktanya, pemenang proyek tersebut bukan Likotama.

Salah satunya proyek pembangunan Jembatan Selat Rengit di Kepulauan Meranti, Riau, senilai Rp 212 miliar. "Likotama tidak mengerjakan proyeknya karena yang menang perusahaan lain," ucap Adi. Dia menolak menyebutkan pemenang empat proyek tersebut.

Meski sudah tahap penyidikan, jaksa belum menetapkan tersangka. Adi beralasan, peningkatan status dari penyelidikan itu untuk membuka akses jaksa ke dalam dugaan korupsi tersebut.

Bank DKI membuka pintu untuk jaksa guna menyidik dugaan pembobolan bank itu. "Kami akan tunduk pada hukum dan menyerahkan ke aparat hukum," kata Sekretaris Perusahaan Zulfarsha.

Karena bukan pelaksana proyek, Likotama tak bisa mengembalikan cicilan. Akibatnya, rasio kredit macet Bank DKI naik dari 2 persen menjadi 4,8 persen atau

Rp 1,3 triliun. Padahal penyertaan modal pemerintah Jakarta saja hanya Rp 1,2 triliun.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Catur Laswanto tak memungkiri kenaikan persentase kredit macet, termasuk pemberian kredit ke Likotama, menjadi penyebab jajaran direksi diganti. "Direksi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian," kata Catur.